

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA HARGOTIRTO
KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO**

Oleh: Eka Herdi Nugraha/ Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Disamping itu bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan metode *purposive*. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Hargotirto, Ketua BPD Desa Hargotirto, Ketua LPMD Desa Hargotirto dan 10 orang Perangkat Desa Hargotirto yang terdiri dari kepala urusan, kepala seksi, dan dukuh di Lingkungan Desa Hargotirto. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan *cross check*. Teknik analisis data melalui 3 langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Hargotirto adalah sebagai berikut. *Pertama*, kegiatan perencanaan yang mengandalkan musyawarah dusun dan musyawarah desa dalam menjangkau aspirasi masyarakat desa. *Kedua*, kegiatan pelaksanaan dan penatausahaan yang meliputi kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *Ketiga*, kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Hargotirto untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa agar terwujud pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan transparan. 2) Hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dana yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yaitu minimnya sumber daya manusia dan mundurnya perencanaan APBDesa Hargotirto sampai bulan Mei. Hambatan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat masih kurang maksimal, kecemburuan masyarakat yang menyulitkan program-program pemerintah desa seperti bedah rumah, lantainisasi dan bantuan raskin, dan lemahnya perubahan kultural masyarakat dimana stimulus dana desa bukan membuat masyarakat semakin berswadaya justru tergantung pada stimulus-stimulus dana desa berikutnya.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

**VILLAGE DEVELOPMENT FUND MANAGEMENT AND RURAL
VILLAGE EMPOWERMENT IN HARGOTIRTO VILLAGE OF KOKAP
DISTRICT OF KULON PROGO RESIDENCE**

By Eka Herdi Nugraha/ Legal and Civic Education Department, Social Science
Faculty, Yogyakarta State University

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the village fund management in rural development and rural communities' empowerment. Besides, it aims to identify any obstacles in the management of the village fund.

This research is a descriptive study with qualitative approach. Determination of research subjects uses purposive method. The subjects are the Chief of Hargotirto, the Chairman of BPD Hargotirto, the Chairman of the Hargotirto's LPMD and 10 people of Hargotirto's staff consisting of affairs chief, section chief, and *dukuh* in the Hargotirto villages. The data collection technique uses interviews and documentation methods. The technique of data validity of the data uses cross check. Data analysis technique is through three steps: data reduction, data presentation and conclusion.

The results show that: 1) the management of village funds in rural development and the empowerment of rural communities in Hargotirto are as follows. First, the planning activities that rely on village meetings and sub village meetings in collecting the aspiration of the villagers. Second, the implementation and administration of activities which include the activities of community development and empowerment. Third, reporting and accountability activities carried out by the Government of Hargotirto to account for the financial management of the village including the village fund in order to realize good governance, effective, efficient and transparent. 2) The obstacles that occurs in fund management that internal constraints and external constraints. The internal resistance is the lack of human resources and planning pullback of APBDes of Hargotirto village until May. While the External obstacles are that supervision by the public is still less than the maximum, society jealousy that complicate government programs villages such as house surgeon, lantainisasi and raskin, and the lack of cultural change society in which the stimulus funds the village instead of making the community more self-sufficient, it depends on the stimuli of the next village funds.

Keywords: Village Fund Management, Rural Development and Rural
Community Empowerment

I. PENDAHULUAN

Sekarang ini terjadi ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Prospek dan pesona ekonomi berhasil menyihir warga desa untuk urbanisasi ke perkotaan. Warga desa pindah ke perkotaan untuk mendapatkan penghasilan dan pekerjaan yang lebih layak. Desa merupakan pusat inti dari pembangunan ekonomi Indonesia. Dana desa yang jumlah sekitar 300 juta tidak bisa menjamin percepatan desa bila tidak dibarengi langkah-langkah konkret dari pemerintah dan pemerintah desa¹. Pemerintah desa harus mampu mengelola dana desa tersebut agar dapat menciptakan iklim perekonomian desa yang baik. Hal ini dapat mendorong pembangunan ekonomi pedesaan yang bersaing. Oleh karena itu diperlukan sebuah upaya nyata pemerintah untuk menggenjot daerah agar kesenjangan antar desa dan kota yang begitu besar dapat dihindari.

Pemerintahan desa menjadi ujung tombak dalam pengelolaan dana desa. Dana desa yang berjumlah relatif besar tersebut harus dikelola demi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dijelaskan dengan Pasal (18) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya desa yang otonom. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan tidak terjadi lagi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota.

Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa berbeda dengan kelurahan yang statusnya di bawah kecamatan. Kelurahan hanyalah wilayah kerja dibawah camat yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur pemerintahan². Oleh karena itu desa mempunyai kewenangan untuk mengelola sendiri pemerintahannya dan menentukan kebijakan desa. Kemandirian desa merupakan hal yang mutlak dalam upaya pemberdayaan masyarakat sampai tingkat paling pinggir.

Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program pemerintah. Desa otonom sudah terwujud berupaya menyediakan tempat warga masyarakat untuk kehidupan berkelanjutan yang akan menekan angka urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota³.

Desa dapat dikatakan otonom apabila memiliki kewenangan dan keleluasaan penuh merencanakan pembangunan sesuai dengan prioritas dan yurisdiksi yang dibagi melalui desentralisasi politik. Otonomi pembangunan ini terjadi bila ada devolusi perencanaan desa, yakni perencanaan yang berhenti di desa (*village self planning*). Perencanaan desa bukanlah perencanaan daerah yang berada di desa, melainkan sebagai sebuah sistem perencanaan yang berhenti ditingkat desa atau dikelola sendiri (*self planning*) oleh desa yang berbasis pada masyarakat setempat⁴.

Pemerintah desa memiliki potensi untuk menemukan kendala-kendala dalam pengelolaan dana desa di lapangan. Mulai dari pencairan hingga

pelaksanaan dana desa, dana desa sering tidak dilaksanakan karena pemerintah desa mengalami ketakutan dalam mencairkannya. Kemudian kebijakan baru ini membuat pemerintah desa berhati-hati dalam pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Dan terakhir dana yang besar ini menuntut adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang lebih profesional dan terbuka. Pemerintah desa pasti akan menemukan kendala-kendala dalam pengelolaan dana desa ini. Hal ini diperkuat bahwa dana ini baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 ini.

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah kabupaten juga telah melaksanakan penyaluran dana desa ke seluruh desa di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Salah satu kecamatan di Kulon Progo yakni Kecamatan Kokap masuk dalam 16 kecamatan di DIY yang merupakan peta wilayah dengan jumlah orang miskin paling besar. Khusus di Kabupaten Kulon Progo terdapat 3 Kecamatan yakni Kalibawang, Samigaluh dan Kokap⁵.

Kecamatan Kokap terdiri dari 5 Desa yakni, Desa Hargorejo, Desa Hargowilis, Desa Hargotirto, Desa Kalirejo, Desa Hargotirto, dan Desa Hargomulyo. Kecamatan Kokap memiliki luas wilayah 7.379,95 Ha dan jumlah penduduk 39.793 jiwa. Kemiskinan jumlah penduduk di wilayah Kokap mencapai 11.498 dengan 4.340 KK miskin sejumlah 14.853 jiwa, tersebar di desa Hargorejo KK miskin 3.546 jiwa, Hargotirto 1.046 KK miskin 3.714 jiwa, Hargomulyo 796 KK miskin 2652 jiwa, Kalirejo 736 KK miskin 3546 jiwa,

dan Hargowilis 691 KK miskin 2172 jiwa⁶. Desa Hargotirto menjadi desa dengan jumlah penduduk termiskin terbanyak di Kecamatan Kokap pada tahun 2012. Desa Hargotirto merupakan desa percontohan nasional yang mempunyai status sebagai desa sejahtera mulai 2010. Selain itu desa ini termasuk dalam kategori desa karangkopek yang tidak mempunyai tanah bengkok untuk penghasilan perangkat desanya. Semua penghasilan perangkat desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kulon Progo.

Dari pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai Bapak Ahmad Dardiri warga masyarakat Desa Hargotirto yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016, secara umum Desa Hargotirto masih tertinggal dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dikarenakan posisi Desa Hargotirto yang kondisinya perbukitan sehingga akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mendapatkan tantangan lebih berat. Kondisi infrastruktur jalan yang belum baik sehingga banyak dusun yang belum terhubung. Hal ini terkendala oleh medan yang berat untuk membuka jalan baru. Infrastruktur yang lain seperti pengadaan air bersih dan perawatan sungai juga masih kurang. Kemudian tidak sedikit warga yang mengalami buta huruf dan putus sekolah. Kebijakan baru yang segar ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan dana desa yang profesional agar dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Hargotirto.

Dengan berbagai fakta di atas membuat penulis tergugah untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Keseriusan pengelolaan dana desa menjadi penting untuk dicapai Pemerintah Desa Hargotirto agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Hargotirto menuju desa yang mandiri dan sejahtera. Hambatan dan kendala dilapangan dapat dijadikan motivasi untuk berupaya lebih keras demi pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan dan mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hal ini menjadi fokus perhatian berbagai pihak agar pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Hargotirto dapat maksimal.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati ⁷. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah yang akan diteliti yakni pertama, masalah tetap dari awal sampai akhir penelitian, kedua, masalah akan meluas dan mendalam, ketiga, masalah akan berubah total setelah peneliti masuk ke dalam lapangan ⁸.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Kepala Desa Hargotirto dan Lingkungan Desa Hargotirto. Penelitian akan dilaksanakan di beberapa tempat yaitu: Kantor Kepala Desa Hargotirto, rumah Kepala Dusun dan rumah Ketua BPD di Hargotirto. Waktu penelitian dalam penelitian ini adalah Januari sampai Maret 2016.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*. *Purposive* merupakan teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu dan tujuan tertentu⁹. Hal tersebut sama dengan penjelasan menurut Faisal bahwa peneliti menentukan sendiri subjek penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu¹⁰. Dengan teknik ini berarti tidak semua orang dapat menjadi subjek penelitian karena subjek penelitian harus memiliki tujuan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Pertimbangan dan tujuan tertentu dalam penelitian ini adalah:

1. Subjek penelitian yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Hargotirto.
2. Subjek penelitian yang memiliki pengalaman tentang pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Hargotirto.
3. Subjek penelitian yang menjadi pengelola dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Hargotirto.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Desa Hargotirto sekaligus penanggungjawab pengelolaan keuangan desa di Desa Hargotirto.
2. Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Hargotirto sebagai koordinator pelaksana teknis pengelola dana desa.
3. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan Desa Hargotirto sebagai pelaksana teknis pengelola keuangan desa di Desa Hargotirto.
4. Kepala Seksi Pembangunan Desa Hargotiro sebagai pelaksana teknis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Hargotirto.
5. Kepala Seksi Kesra Desa Hargotirto sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat di Desa Hargotirto.
6. Kepala Urusan Umum dan Aset Desa Hargotiro sebagai pelaksana pengelolaan dana desa.
7. Dukuh sebagai pelaksana pengelolaan dana desa di Lapangan.
8. Ketua Badan Perwakilan Desa sebagai perwakilan masyarakat Desa Hargotirto.
9. Ketua Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa sebagai unsur masyarakat pelaksana pembangunan Desa Hargotirto.

Teknik Pengumpulan Data dan Pemeriksaan Keabsahan Data

Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan wawancara satu persatu (berhadap-hadapan) dan tidak

terstruktur karena pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan, yang nantinya akan ditanyakan kepada subjek penelitian. Wawancara-wawancara memerlukan pertanyaan-pertanyaan secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari informan¹¹. Dengan demikian diharapkan penggunaan metode wawancara tersebut bisa menghasilkan jawaban, informasi, keterangan, tanggapan, maupun pernyataan dari subjek penelitian tentang pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa Hargotirto dan faktor-faktor penghambatnya. Kemudian selama penelitian berlangsung, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai data pendukung dan penunjang. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian ini lebih kredibel dengan didukung dengan foto-foto dan laporan-laporan. Hal yang harus dicermati adalah tidak semua dokumen memiliki kualitas yang tinggi. Oleh karena itu harus diuji dulu keaslian dari dokumen tersebut¹². Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, pedoman administrasi pengelolaan keuangan desa sekretariat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan notulensi rapat musrengbangdes dan rapat-rapat yang lain.

Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check* dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali hasil wawancara antara subjek penelitian dan hasil dari dokumentasi¹³. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan *cross check*

dilakukan dengan mengecek data penelitian hasil wawancara dari subjek penelitian dengan data dari dokumentasi hasil penelitian yang berkenaan dengan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Hargotirto dan hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Hargotirto.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data induktif yang merujuk pada model Miles dan Huberman¹⁴. Berdasarkan model tersebut, ada tiga langkah dalam melakukan analisis data.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuang yang tidak perlu. Oleh karena itu data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas. Dalam mereduksi data, peneliti diharapkan mendapatkan temuan baru. Dalam mereduksi data diperlukan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi¹⁵. Peneliti memilih data yang sesuai, menitikberatkan pada data yang mengarah pada pemecahan masalah dan memilih data yang dapat menjawab permasalahan mengenai pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa serta hambatan dalam pengelolaan dana desa di Desa Hargotirto.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Dalam menyajikan data yang paling penting dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. . Penyajian data ini dilakukan sesuai dengan apa yang diteliti sehingga diperoleh kemudahan dalam menafsirkan data mengenai pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta hambatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Hargotirto.

3. Verifikasi dan Pengambilan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan berkembang setelah peneliti di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini dapat menemukan temuan baru setelah peneliti di lapangan. Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih gelap sehingga lebih terang dan jelas setelah diteliti. Data yang diproses kemudian diambil kesimpulan yang ditarik dan diverifikasi selama penelitian berlangsung, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan

masyarakat desa serta hambatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Hargotirto.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon progo

Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengaman, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana sebagai pedoman pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa di Desa Hargotirto yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Perencanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa. *Kedua*, Pelaksanaan dan penatausahaan dana desa dalam pembangunan desa. *Terakhir*, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa.

Kemudian Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri namun dengan tetap mendapat fasilitas dari pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana sebagai pedoman pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Hargotirto yaitu sebagai berikut *Pertama*, Perencanaan pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. *Kedua*, Pelaksanaan dan penatausahaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. *Terakhir*, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Dana Desa.

2. Hambatan-Hambatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon progo

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dana desa berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada,

Pemerintah Desa Hargotirto masih menemui beberapa hambatan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di Pemerintah Desa Hargotirto, maka peneliti dapat menjabarkan hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Hargotirto. Adapun hambatan-hambatan tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

a. Hambatan Internal

Hambatan secara internal merupakan hambatan yang muncul di dalam diri atau dalam Pemerintah Desa Hargotirto sendiri, yang meliputi:

- 1) Dari segi sumber daya manusia (perangkat desa) Desa Hargotirto menemui hambatan terutama dalam hal keterampilan komputer guna menunjang pelaporan penggunaan dana desa dan dana yang lain yang masih rendah. Perangkat desa terutama kepala wilayah atau dukuh tidak semua bisa menggunakan teknologi komputer.
- 2) Perencanaan APBDes mundur dari rencana awal yang berdampak pada mundurnya pencairan dana desa tahun 2015 yakni pada awal Mei. Kemunduran ini sebenarnya juga diakibatkan oleh kerancuan terkait kementerian yang mengelola dana desa ini sehingga setelah adanya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri barulah dana desa ini dapat digunakan.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang muncul dari luar lingkungan Pemerintah Desa Hargotirto, yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat kurang maksimal sehingga partisipasi masyarakat masih kurang. Budaya “Pekewoh” menjadi sebuah hal yang membatasi masyarakat untuk kritis mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan dana desa dalam APBDesa di Desa Hargotirto. Walaupun masyarakat aktif dalam musyawarah dusun atau desa untuk menggunakan haknya berpartisipasi namun dalam pengawasan yang dilakukan masyarakat kurang maksimal..
- 2) Kecemburuan masyarakat yang menyulitkan program-program pemerintah desa seperti bedah rumah, lantainisasi dan bantuan raskin. Seringkali masyarakat saling cemburu antar satu dengan yang lain terkait kondisi ekonomi untuk menentukan yang pantas mendapatkan bantuan seperti Raskin, lantainisasi atau bedah rumah.
- 3) Lemahnya perubahan kultural masyarakat dimana stimulus dana desa bukan membuat masyarakat semakin berswadaya justru tergantung pada stimulus-stimulus dana desa berikutnya. Mentalitas masyarakat yang berubah menjadi peminta apabila terus dialiri dan diguyur bantuan dalam porsi yang besar. Mentalitas masyarakat desa terus berharap dengan bantuan dari pemerintah tanpa ada usaha untuk swadaya dalam membangun desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas mengenai pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut

1. Pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari berbagai kegiatan meliputi kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan dan penatausahaan, dan kegiatan pertanggungjawaban dan pelaporan. Dari beberapa kegiatan tersebut memerlukan peran aktif masyarakat (*Active Citizen*) baik dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban dan pelaporan. Proses pembangunan desa didukung dari berbagai hal seperti pertanian, pendidikan, kesehatan dan perumahan. Proses tersebut dilaksanakan dengan kekuatan sendiri demi mewujudkan “desa yang mandiri”. Pemberdayaan masyarakat didukung dengan konsep baru yakni “*People-centered*”, *Participatory, empowering and sustainable*. Kemudian dari upaya perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa akan bermuara pada sebuah nilai filosofis yaitu gotong royong.

2. Hambatan dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo yaitu
 - a. Hambatan Internal yang meliputi sumber daya manusia yang masih rendah dan perencanaan APBDes yang mundur.
 - b. Hambatan Eksternal yang meliputi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat kurang maksimal, kecemburuan masyarakat yang menyulitkan program-program pemerintah desa, Lemahnya perubahan kultural masyarakat dimana stimulus dana desa bukan membuat masyarakat semakin berswadaya justru tergantung pada stimulus-stimulus dana desa berikutnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka perlu saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
 - a. Perencanaan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo harus lebih baik dan akomodir berbagai kalangan serta mampu mengatasi kemiskinan dan kesenjangan. Pembangunan tidak hanya difokuskan dalam pembangunan fisik saja namun pembangunan manusia.
 - b. Pembangunan harus mampu menampung aspirasi rakyat dan dilaksanakan dengan gotong royong dari rakyat. Kemudian pembangunan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Untuk Masyarakat Desa Hargotirto

- a. Masyarakat harus lebih mengedepankan gotong royong dan swadaya agar pembangunan desa lebih baik dan tidak terlalu tergantung oleh dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Gotong royong dan swadaya merupakan sebuah kekayaan masyarakat desa yang tidak dapat ditemukan di wilayah perkotaan.
 - b. Selain itu masyarakat harus menguatkan struktur kebudayaan agar masyarakat desa dapat berkembang secara lebih mandiri dan tidak ada ketergantungan yang berlebihan.
3. Untuk Pemerintah Desa Hargotirto
- a. Budaya lokal dan kesenian lokal harus dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat, sehingga potensi lokal ini tidak hilang dan terus terjaga eksistensinya di dalam masyarakat. Budaya lokal seperti jatilan dan ketoprak harus dikembangkan dan dijaga eksistensinya sebagai sebuah kekayaan masyarakat.
 - b. Selain itu, pengelolaan dana desa kedepan harus mampu masuk keseluruh lini kehidupan termasuk bidang kepemudaan dan kesenian. Bidang-bidang ini harus tetap dimajukan supaya agenda pembangunan manusia dapat berjalan baik.

DAFTAR PUSTAKA

-
- ¹ Suadi. (2015). *Urbanisasi dan Problematika Pembangunan Desa*. Diakses dari www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/11/21/urbanisasi-dan-problematika-pembangunan-desa pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 21:20 WIB.

-
- ² Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- ³ Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- ⁴ Rozaki, Abdur dkk. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE PRESS.
- ⁵ Wibisono, Dani. (2012). *Kokap Termasuk Kecamatan Miskin, Bupati Hasto Berharap Jangan Sedih*. Diakses dari <http://www.kr-radiojogja.com/2012/03/kokap-termasuk-kecamatan-miskin-bupati.html> pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 01:19 WIB.
- ⁶ Media Center. (2012). *Bupati Hasto: Jangan Bersedih, Kokap Termasuk Kecamatan Miskin*. Diakses dari <http://www.kulonprogokab.go.id/v21/cetak.php?id=2004> pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 4:07 WIB.
- ⁷ Moleong, Lexy. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- ⁸ Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- ⁹ Prastowo, Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media.
- ¹⁰ Faisal, Sanapiah. (2010). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- ¹¹ John W. Creswell. (2009). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ¹² Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- ¹³ Bungin, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Kearah Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- ¹⁴ Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- ¹⁵ _____. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.